

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan salah satu media komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder*. Fokus utama dalam pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang tersedia dengan mengukur laba (*earning*). Agar laba dapat diukur untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan hasil pengukuran tersebut, maka perusahaan berkewajiban menyusun laporan keuangan. Diharapkan laporan keuangan mampu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kita sadari bahwa satu kelemahan yang terjadi dalam laporan keuangan ketika laporan keuangan tersebut berbasis akrual yang melibatkan banyak estimasi atau taksiran (Scott, 2013)

Kecurangan laporan keuangan menempati posisi ketiga pada tingkat *fraud* yang paling banyak ditemukan. survei yang dilakukan oleh ACFE tahun 2016 yang menyatakan bahwa *fraudulent financial reporting* merupakan kecurangan yang paling merugikan. Hal ini diduga karena di Indonesia berbagai kejahatan yang berasal dari kejahatan laporan keuangan belum banyak terungkap, seperti kejahatan penipuan informasi di bursa efek, serta kejahatan karena penipuan informasi pajak (ACFE, 2016).

Tahun 2015 perusahaan besar asal jepang yaitu Toshiba terkena kasus penggelebugan keuntungan sebesar ¥151,8 miliar (setara dengan Rp 15,85 triliun) sejak tahun 2008-2015 (Hakim, 2015). Kasus tersebut memberikan bukti bahwa informasi akuntansi bisa direkayasa sesuai dengan keinginan manajemen sebagai pengelola sehingga pihak pemilik merupakan pihak yang paling besar

menanggung kerugian. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya atau disebut dengan manajemen laba (Sanjaya dan Ulupui, 2016).

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar pelaporan keuangan yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standards Board* atau IASB). Indonesia telah melakukan adopsi penuh IFRS mulai 1 Januari 2012. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain. Secara teoritis setelah beralih ke IFRS yang berbasis prinsip (*principle based*), lebih cenderung pada penggunaan nilai wajar (*fair value*), dan pengungkapan yang lebih banyak dan rinci diharapkan mampu meminimalisir *earnings management* (Cahyati, 2011).

Salah satu dampak terkait konvergensi IFRS adalah pencabutan PSAK 44 diganti Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 21. Pernyataan ini membahas tentang pengakuan pendapatan dan beban terkait aktivitas perusahaan real estate. Prinsip pengakuan pendapatan perusahaan real estate menggunakan *full accrual method* untuk semua jenis pendapatan yang diakui oleh perusahaan (PPSAK 7, 2011). Meskipun ISAK No. 21 belum diberlakukan, perusahaan real estate sudah menggunakan prinsip yang diatur dalam standar tersebut. Hal ini secara substansial memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan yang semakin relevan,

namun disisi lain secara praktis juga menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba dengan memainkan angka akrual dalam laporan keuangan.

Teori keagenan (*agency theory*), menjelaskan bahwa terdapat *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) dimana *principal* memperkerjakan *agent* untuk mengelola sumber daya serta memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Riwayati *et al.* (2016) pemberian wewenang tersebut akan berdampak terhadap kemungkinan manajemen tidak bertindak sesuai dengan harapan dari pemilik (konflik keagenan). Selain itu keadaan inilah yang membuat manajer menguasai informasi dibandingkan pihak lain, kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*) dimana kondisi tersebut memberikan celah kepada manajemen untuk melakukan perekayasaan laba (*earning management*) (Sulistyanto, 2008).

Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi. Manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan (Scott, 2013). Manajemen laba diduga muncul dan dilakukan oleh manajer atau para penyusun laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu perusahaan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan tersebut.

Praktik manajemen laba akan berdampak pada kualitas laba yang rendah. Hal ini disebabkan karena laba yang ditampilkan oleh perusahaan tidak mampu memprediksi kinerja masa depan perusahaan. Menurut Schipper dan Vincent (2003) menjelaskan salah satu pengukuran kualitas laba berdasarkan sifat runtun-waktu laba meliputi: persistensi, prediktabilitas (kemampuan prediksi), dan variabilitas. Laba yang persisten merupakan laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya. Kemampuan prediksi menunjukkan kapasitas laba dalam memprediksi laba masa depan atau laba yang berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai kemampuan tinggi dalam memprediksi laba di masa datang. Berdasarkan konstruk variabilitas, laba berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai variabilitas relatif rendah. Laba yang dihasilkan dari berbagai estimasi (*earning management*) cenderung tidak mampu menggambarkan laba yang akan dihasilkan pada masa mendatang.

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) terdapat tiga motif perusahaan melakukan manajemen laba yang tidak terlepas dari *positive accounting theory*, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis* dan *political cost hypothesis*. Rencana bonus memotivasi manajemen untuk menampilkan kinerja yang baik dengan memaksimalkan laba tahun berjalan. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat

(Yatulhusna, 2015). Oleh karena hal tersebut, keterkaitan antara profitabilitas dengan manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan mempertahankan harga saham dan mempertahankan investor yang ada.

Kontrak utang (*debt covenant*) merupakan komitmen perusahaan terhadap kreditur untuk memenuhi kewajiban utangnya dimasa depan. Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi komitmen tersebut untuk memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal ini kemudian memotivasi manajemen untuk menampilkan kinerjanya yang baik dengan cara melakukan manajemen laba untuk menghindari perjanjian hutang (Astari dan Suryanawa, 2017). Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi menggambarkan besarnya hutang dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, hal tersebut diduga akan mendorong perusahaan melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *default*, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktunya (Putri, 2014).

Political cost seringkali dihubungkan dengan ukuran perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1990). Semakin besar perusahaan maka semakin besar biaya politik yang dihadapi karena ukuran perusahaan akan berbanding lurus dengan tingkat laba perusahaan (Jayanti dan Sapari, 2016). Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (*asset*) dan total penjualan (*net sales*) yang dimiliki oleh perusahaan (Kusumawardhani, 2012).

Perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih mendapatkan peluang untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar (Zeptian dan Rohman, 2013).

Penelitian Ulya (2015); Tala dan Karamoy (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin besar perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Namun, Amelia dan Hernawati (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Hal ini berarti profitabilitas tidak menjadi alasan oleh perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba.

Ramadhani *et al.* (2017); Wijaya dan Christiawan (2014) meneliti tentang pengaruh *capital intensity ratio*, *free cash flow*, kualitas audit, dan *leverage* terhadap manajemen laba menunjukkan hasil bahwa *leverage* yang diukur dengan rasio hutang terhadap total aset berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun Rachmawati (2017); Ulya (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *leverage* tidak mempengaruhi praktik manajemen laba.

Ulya (2015); Manullang (2015) menunjukkan hubungan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Perusahaan besar melakukan transfer biaya politik, dimana proses politik ini memiliki dampak terhadap pemilihan prosedur akuntansi yang dapat mengalokasikan laba tahun sekarang ke laba tahun

mendatang. Santana dan Wirakusuma (2016) menunjukkan hasil yang berbeda dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba.

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu tentang praktik manajemen laba memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor yang memotivasi praktek manajemen laba. Penelitian ini mengacu pada Tala dan Karamoy (2017) yang menguji pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek, yaitu menggunakan seluruh perusahaan real estate yang terdaftar di BEI dan tahun penelitian 2016. Perbedaan lainnya terdapat pada variabel independen dimana peneliti menambah variabel ukuran perusahaan untuk merespon saran daripada penelitian terdahulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba.
2. Bagi dunia bisnis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan pengetahuan dalam dunia bisnis.
3. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak manajemen dalam menetapkan peraturan-peraturan mengenai *leverage* sehingga peraturan tersebut dapat meminimalisir praktik manajemen laba dalam perusahaan.